BERTANI ATAU MATI



PERJUANGAN BERKELANJUTAN PETANI DI INDONESIA MELAWAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG AKAN MENGHANCURKAN TANAH MEREKA

#1 Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta

INTRODUKSI:

Sangatlah tidak mengejutkan lagi bagi siapapun, bahkan bagi yang merasa "apolitis", bahwa korporasi dan para konglomeratnya akan menggunakan segala cara untuk mendapatkan akumulasi profit yang mereka inginkan. Mereka mencapai targetnya dengan mengabaikan harga kerusakan dari masyarakat lokal, budaya, lingkungan, kestabilan ekonomi orang-orang yang tak berada di puncak "rantai makanan", serta siapapun berada di jalan mereka menuju tujuan tersebut. Hutan yang dihancurkan adalah dampak tipikal, begitu pula dengan perairan yang teracuni, sungai dan sumber air yang mengering, dan lahan-lahan subur yang diubah menjadi tanah beracun...dan semua ini demi produk final yang dinanti-nanti: Kekuasaan dan kemakmuran bagi persentase minoritas yang berada di puncak, represi dan kelaparan bagi kaum sisanya.

Salah satu cara dari korporasi-korporasi ini dapat berhasil mencapai tumpukan profit idaman mereka, adalah dengan menggeser operasi mereka ke area-area "terpencil". Selama masa yang begitu lama, korporasi-korporasi ini telah berhasil mengeruk sumber daya dari "dunia ketiga", dan Indonesia hanyalah salah satu dari daftar panjang negara-negara yang dijual oleh pemerintahnya sendiri kepada mereka.

Namun tentu saja, ketika pemerintah setuju untuk mengobral apa yang ada di dalam negaranya, itu tidak berarti masyarakat lokal juga setuju dengan mereka. Banyak orang yang tidak ingin mengorbankan tanah, sumber kehidupan dan budaya mereka demi kemakmuran yang lebih besar bagi para CEO. Berbagai cara yang dilakukan oleh korporasi pertambangan seperti memanipulasi, menteror, dan mengambil alih tanah secara paksa telah diabaikan terlalu lama. Sudah waktunya untuk orang-orang di seluruh dunia tahu, bahwa ini bukan sekedar perkara tanah. Ini juga tentang daya hidup 42,000 orang yang dicuri dari tangan mereka. Ini tentang dipaksanya mereka untuk memasuki garis kemiskinan tanpa akhir. Ini mengenai keseluruhan pulau dan penduduknya, yang mendapatkan risiko lebih tinggi akan potensi-potensi bencana alam akibat penghancuran yang dilakukan oleh tambang. Semua dampak ini, seperti biasa, hanya demi potongan profit (yang sangat besar) bagi segelintir orang.

Publikasi ini diniatkan untuk membuka aktivitas-aktivitas para korporat ini di tanah lokal, aktivitas yang sebenarnya bahkan dianggap ilegal oleh hukum yang mereka gunakan. Kami juga ingin berbagi informasi, mengenai perjuangan para petani yang masih terus berlanjut, serta mereka yang terancam untuk kehilangan segala-galanya, bukan sekedar propertinya, namun juga kemandiriannya, dan kemungkinan besar juga hidupnya.

Kulon Progo, salah satu dari area yang saat ini terancam oleh mega korporasi pertambangan, mereka juga akan kehilangan

pengetahuan dan kemampuan yang telah mereka kembangkan sendiri-yaitu teknik bertani yang unik, yang telah mereka kembangkan secara mandiri selama lebih dari 30 tahun. Metode pertanian di pesisir pantai yang lebih ramah lingkungan ini, juga akan dimusnahkan begitu saja oleh para penambang, sekedar karena mereka hidup diatas tanah yang mengandung besi. Atas nama profit yang maha kuasa, mereka akan disingkirkan dengan cara-cara klasik: pengklaiman tanah ilegal, intimidasi, serta daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia.

Keserakahan industri memiliki harga yang harus dibayar, yang bukan sekedar nominal, namun segala penghancuran seperti ini. Media-media yang dimiliki oleh mereka tak akan pernah bisa diandalkan untuk memberi informasi yang tak menguntungkan bagi mereka. Sudah saatnya kita berbagi informasi mengenai apa sebenarnya yang tengah terjadi saat ini, dibalik rutinitas kehidupan harian. Menghancurkan ilusi yang ditanamkan dalam kepala kita: bahwa kehancuran hidup orang-orang yang tak dikenal, tak ada hubungannya dengan hidup kita sama sekali. Bahwa kita dan mereka yang menanam tanaman-tanaman yang kita makan, sama sekali tak terhubung dan tak perlu saling memperdulikan. Bahwa hal-hal seperti ini sekedar 'biasa saja', dan layak untuk tak dianggap ada. Ilusi seperti ini hanya ada agar penghancuran seperti ini terus berlanjut... tanpa gangguan yang signifikan. Untuk siapa?

DALAM SOLIDARITAS,
UNREST COLLECTIVE...

(Semua material yang dicetak dalam publikasi ini dibuat atas permisi dan persetujuan dari PPLP-KP)



Dampak Pertambangan di Indonesia Saat ini.

Pertambangan yang disponsori oleh korporasi telah mengambil keuntungan dari sumber daya alam Indonesia begitu lama. Namun nampaknya mereka semakin meningkatkan metode agresifnya untuk mencapai target profit mereka. Artinya, itu bukan 'hanya' penghancuran alam, massa lokal, dan hunian pribumi, namun juga pelanggaran begitu saja atas hak asasi manusia.

Puluhan ribu penduduk lokal selalu digusur begitu saja oleh pertambangan korporat, saat mereka memiliki proyek tambang. Orang-orang ini tak sekedar kehilangan rumahnya, namun juga sumber pangan mereka, cara mereka untuk menunjang pemasukan bagi keluarga dan komunitasnya. Orang-orang ini dipaksa untuk memasuki garis kemiskinan dan sumber penghidupan yang tak jelas.

Pada area dimana sebelumnya terdapat hutan, semak, pesisir berekosistem; kini tersisa tanah dengan lubang-lubang besar yang gersang, tanpa kehidupan karena kandungan racun yang kini ada di dalamnya. Manusia dan makhluk hidup lainnya tak lagi mendapat penghidupan mereka dari tanah tersebut.

Di kepulauan Indonesia, dimana pertambangan selalu didirikan, seperti di Borneo, Sumatra, Papua, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi, kamu dapat membaca laporan-laporan mengenai itu. Kamu bahkan dapat melihat area penghancuran tersebut terbentang melintasi horison, kilometer demi kilometer.

Penghancuran tersebut telah membuat pulau-pulau ini menjadi rapuh terhadap bencana-bencana alam seperti tsunami, tingkat erosi juga meningkat begitu cepat hingga nyaris tak tersisa harapan untuk dilakukannya rekonstruksi/penghijauan kembali. Bahkan bila tambang-tambang itu pergi secepat yang mereka janjikan. Bukti nyata dari studi-studi independen terus menunjukkan, bahwa tak terdapat harapan bagi pemulihan lahan paska penghancuran berkecepatan tinggi seperti tambang. Upaya retroaktif untuk membangun ulang pantai-pantai, bila *memang* dilakukan pun, selalu gagal untuk mencapai kondisi alami yang sebelumnya.

Dampak mengerikan ini tidak hanya berlaku bagi orang-orang dan lingkungan hidup Indonesia, namun juga bagi penduduk dunia yang lainnya. Penghancuran pesisir dan hutan tersebut telah mengurangi produksi oksigen secara besar-besaran, selain juga menggeser permukaan darat dan lautan secara permanen.

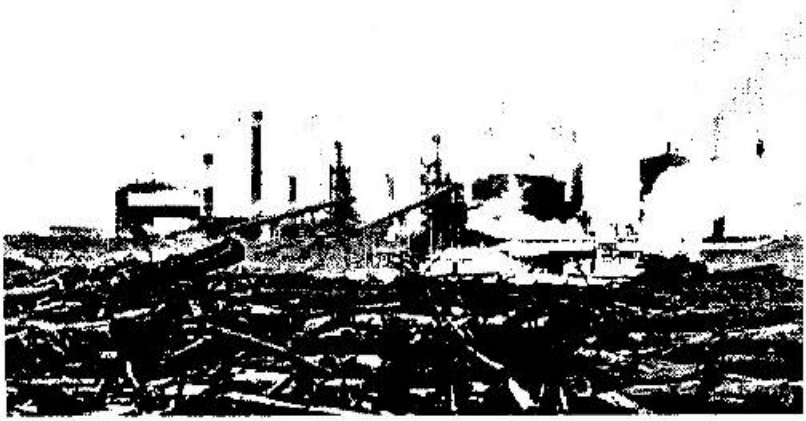
Dimanapun di seluruh dunia, korporasi-korporasi selalu menggunakan *cara apapun* untuk mencapai target mereka. Ini tentu bukan hanya terjadi di indonesia. Penyuapan, intimidasi, ancaman, teror psikologis dan fisik, penculikan, pemerasan, pemerkosaan, pemenjaraan ilegal, tekanan dari preman-preman sewaan, polisi dan bahkan tentara, dan pada beberapa kasus, juga pembunuhan; tunggal maupun jamak.

Pemerasan dan penyuapan pada umumnya didukung dan bahkan didorong oleh pemerintah pada tingkatan lokal dan nasional, mulai dari petugas-petugas yang bersedia memalsukan laporan, hingga polisi yang berperan sebagai preman bayaran untuk

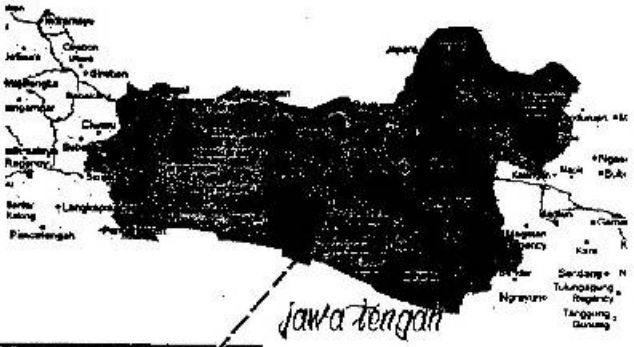
memaksakan klaim ilegal atas hak kepemilikan tanah, melakukan penculikan, memenjarakan dengan proses ilegal, hingga penggusuran penduduk lokal.

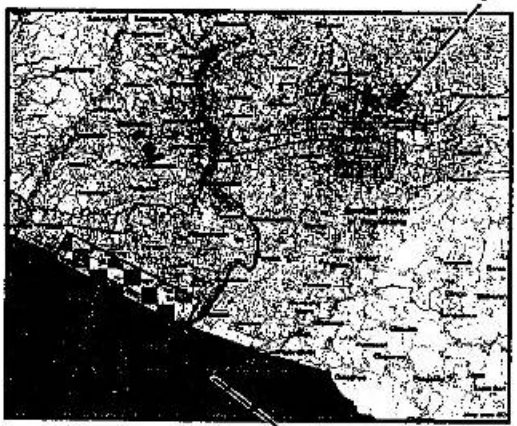
Intimidasi, ancaman, serta penyebaran rasa takut tersebut dilakukan oleh polisi dan orang-orang sewaan lain (seringkali bila tak dilakukan secara langsung oleh polisi, maka setidaknya polisi akan mengawal preman-preman tersebut ketika melakukan tindakan intimidasi: info lebih lanjut mengenai ini dapat dicari di website perjuangan para petani). Hal ini dilakukan demi memecah belah komunitas yang hendak diusir, serta mendistraksi teknik kerja dan mengacaukan komunikasi berdasar kebudayaan mereka. Melihat banyaknya pertambangan yang sukses berjalan di Indonesia, mudah untuk berasumsi bahwa teknik-teknik teroris seperti ini sukses untuk menghancurkan gerakan masyarakat yang berusaha berjuang atas kehidupan mereka sendiri.

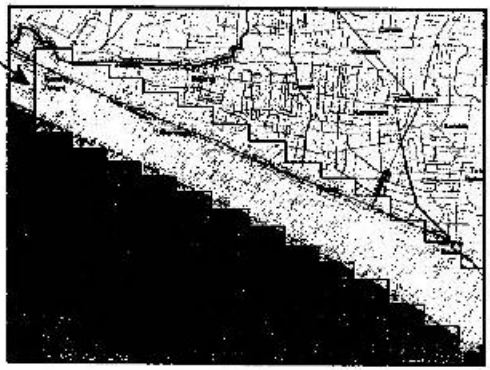
Penghentian segera atas tindakan teroris seperti ini harus dilakukan. Teror terhadap masyarakat lokal di Indonesia, serta tanah-tanah yang tak seharusnya memiliki lubang-lubang raksasa yang dipenuhi dengan racun…sebelum semua berubah menjadi lahan kering yang ditumbuhi pabrik-pabrik, tambang-tambang, dan senyum lebar; *hanya* di wajah para korporat.



AREA YANG TERDAMPAK
TAMBANG PASIR BESI PT JMM







▬ ▬ ▬ = Diperbesar

Riwayat 'Pemakan' Pasir

Pasir adalah riwayat hidup warga pesisir pantai selatan Kulon Progo. Ribuan jiwa di kawasan pantai selatan kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta 'makan' dari pasir. Sampai hari ini mereka masih hidup dari pasir. Sebelum tahun 1942 warga pesisir sudah berusaha 'makan' dari pasir. Menurut catatan dari sejarah lisan Bapak Arjo Dimejo , warga desa Karang Sewu, sebelum tahun 1942 sebagian warga Karang Sewu bertahan hidup dengan merusaha menanam Padi, Ubi Jalar, Kentang dan Kacang di tanah pasir pesisir.

Tapi ketika Jepang datang menjajah, warga tersebut dilarang menjadikan pasir sebagai lahan pertanian. Jepang mencurigai warga penggarap sedang diam-diam membuat garam laut. Setelah Indonesia memploklamirkan sebagai negara merdeka, saat Jepang sudah tidak lagi berdiri di atas tanah pesisir, beberapa warga kembali bertahan 'makan' dari pasir. Menurut penuturan Bapak Arjo Dimejo, Soekarno pernah berkunjung tahun 1948 melihat lahan pesisir, dia mempersilahkan warga memanfaatkan lahan. Setelah kedatangannya, warga yang mayoritas petani berbondong-bondong menggarap lahan pesisir pantai yang tanahnya hanya berisi pasir. Seketika, tahun 1970an terjadi angin badai yang memporak-porandakan lahan pertanian dan rumah-rumah warga. Dalam kondisi buruk ini mereka masih saja bertahan, mereka masih saja ingin 'makan' dari pasir.

Mereka yang hidup di pesisir selatan adalah orang cubung. *Sterotype* bernada ejekan yang ditujukan ke warga yang hidup di pesisir oleh warga lain. Orang cubung bermakna orang kampung yang tertinggal atau inferior dan kondisinya penyakitan. Puluhan tahun lalu pasir pantai yang dibarengi panasnya matahari dan kencangnya tiupan angin laut lebih banyak membuat warga mengalami penyakit kulit dan pernafasan, perut dan mata.

Warga pesisir ini bertani dengan cara memanfaatkan lahan yang bukan berisi tanah, tapi pasir, berharap tanaman subur dari air hujan yang turun secara gratis ke atas bumi dan semua dalam

kondisi hidup yang kritis. Sampai tahun 1980an pesisir pantai adalah tanah pasir yang sangat kritis. Di tanah pasir yang bisa tumbuh hanyalah tanaman berupa umbi-umbian. Gulungan pada saat musim penghujan, lalu ketika kemarau semuanya mati. Kemarau membuat banyak petani beralih menjadi buruh di tempat lain, bahkan sampai pergi ke luar pulau jawa, mereka biasanya kembali 6 sampai 12 bulan kemudian. Sampai tahun 1980an pun sebutan orang cubung itu masih kerap ditujukan. Tapi saat tahun-tahun itulah warga pesisir semakin keras berusaha menemukan berbagai cara bertahan melalui alam dengan 'makan' dari pasir, meski sambil menghirup pasir demi mempertahankan hidup.

***Endong-endongan* Melahirkan Pengetahuan Kolektif**

Orang yang diejek sebagai orang cubung ini hampir setiap malam suka sekali *Endong-endongan*. Adat kebiasan warga desa berkunjung ke rumah antar tetangga, berkumpul, bercerita pengalaman mereka satu sama lain1. Menurut Iman Rejo seorang warga desa Bugel, hal ini adalah tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup baik jasmani maupun rohani yang secara sadar baik langsung maupun tidak langsung. Saat warga bertemu di waktu malam adalah saat mereka melahirkan gerak yang tidak lagi sendirian. Detik-detik seperti inilah embrio yang menggerakkan petani pesisir Kulon Progo bertahan dan menggerakkan hidupnya. Endong-endongan ini bersifat pertemuan pertemanan, cenderung non-hirarkis, spontan dan terbiasa setiap malam. Saat itulah warga mempertemukan hati dan gagasan.

"Dari segi positip pertemuan hati kehati yang didukung oleh pengalaman-pengalaman, timbulah gagasan dari 3 orang (Iman Rejo, Pardiman, Musdiwiyono) warga Dusun untuk mencoba memanfaatkan lahan pasir yang sangat kritis tersebut dengan berbagai cara dan sistim."[2]

Pertemuan malam e*ndong-endongan* itu di berbagai rumah warga menciptakan relasi kepercayaan individu satu sama lainnya di desa yang kondisinya kritis. Mereka mulai membicarakan masalah secara bersama-sama dan menemukan cara penyelesaian bersama. Awalnya perlakuan mereka menanam di lahan kritis adalah dengan penanganan sendirisendiri, tapi kemudian beralih menjadi kebutuhan bersama untuk menemukan cara penanganan. Pengalaman mereka di tempat lain saat menjadi buruh tani maupun

buruh tukang ternyata memberi mereka ingatan untuk layak dibagikan dan didiskusikan.

Berbagai gagasan pun yang lahir dari pertemuan individu dan kelompok di pesisir demi menyiasati alam dan bertahan. Tahun 1984 kelompok warga bergotong-royong mulai membuat sumur ladang sederhana. Karena tanah pasir mudah bergerak, mereka membuat lubang yang sangat lebar, sampai berdiameter 5 meter-an dan dengan kedalaman 5-8 m, kemudian diberi srumbung yang dibuat dari bambu. Sumur ladang pun masih menggunakan kerekan dari bambu. Setelah masing-masing sumur selesai dengan sistem bergantian warga melaksanakan pengolahan tanah dengan mencangkul, membuat bendengan, kemudian memberi pupuk kandang, lalu menanam. Teknologi dan pengolahan lahan ini mereka lakukan secara bergotong royong.

Eksperimentasi warga petani yang selalu mengamati alam terus berlanjut. Mereka mencoba menanam jagung dengan pola penyiraman tertentu, mencoba menanam tanaman keras Akasia dengan wilayah dan cara tertentu juga. Semua percobaan jeli itu mereka lakukan dengan mengamati alam. Sampai suatu ketika, saat seorang warga berjalan ke ladang menemukan sebatang cabe dapat tumbuh dengan baik dekat dengan pohon kelapa. Petani pun mulai menanam dan merawat cabe dengan pola penemuan pengalaman mereka. Sampai akhirnya banyak pengetahuan pertanian yang mereka temukan sendiri tanpa pernah berguru pada siapapun. Inisiatif mereka untuk mengadakan kelompok tani adalah yang mendorong hal ini. Sekarang jumlah kelompok tani di pesisir Kulon Progo sangat banyak sekali, mencapai puluhan.

Petani berhasil menyiasati kebutuhan air dengan membuat sumur ladang. Tadinya sumur ini dibuat secara derhana, dengan melubangi tanah pasir dengan lebar 5 meter dan menahannya dengan bambu. Kemudian bambu mereka ganti dengan semen dan akhirnya sekarang dengan beton. Masing-masing sumur ini pun awalnya digali sangat dalam dan hanya ditimba untuk menyiram. Namun petani merasa cara tersebut tidak efektif. Sampai kemudian petani mencoba cara membuat sumur induk dengan menggunakan pompa air, menyambungkannya secara parallel dengan bambu ke bak bak penampung dari bis beton. Masih merasa kurang, bambu penyalur antar bak diganti dengan memanfaatkan pipa paralon.

Mereka memanfaatkan produk modern tapi dengan memahami karakter alam di lahan pesisir pantai.

Petani menyiasati angin kencang dengan membuat tanaman pemecah angin di sekeliling petak lahan garapan, seperti tanaman jarak, sayur pari dan terong. Mereka juga menanam kelapa di sekitaran lahan agar turut memecahkan angin dan tidak lagi menerbangkan tanaman hingga kemudian mati. Dulu pun, lahan pasir berupa gumuk pasir berundak-undak layaknya bukit-bukit padang gurun yang ditumbuhi semak belukar dan sering berpindah-pindah karena dorongan ombak. Tapi kondisi alam ini mampu dikelola warga dengan mengolah rata tanah pasir dan belukar secara gotong-royong, sambil menyisakan bukit gumuk pasir antara pantai dan lahan pertanian.

Ada banyak hal pengalaman mereka menemukan pengetahuan yang penting dicatat, meski tidak harus disebutkan satu persatu. Pastinya para petani ini mengalami proses panjang yang sangat dinamis saat mempertahankan hidup yang sering terpuruk. Mereka pernah dilarang bertani, mereka dihantam angin setiap hari, mereka juga pernah dihantam badai, gumuk pasir mendominasi jadi lahan dengan kondisi sangat kritis dan rawan penyakit. Tapi dengan kebiasaan bertemu satu sama lain, berbagi, berdiskusi, dan menemukan strategi menggerakkan hidup, mereka yang selalu terpuruk dengan cara bertahan dan berbagi kekuatan bersama setiap hari.

Petani pesisir sejak dulu selalu mengalami kesulitan, tapi selalu saja mampu menyelesaikan masalahnya secara mandiri dan otonom, tanpa bantuan pihak luar apalagi pemerintah. Bahkan jalan menuju lahan pun yang dulunya sulit ditempuh, petani meratakan sendiri. Sejak dari hanya membuat jalan sederhana yang ditanami batu-batu sampai akhirnya mereka aspal dengan tangan sendiri adalah hasil gotong royong dengan dana swadaya warga, tanpa bantuan pemerintah. Begitulah pengakuan semua petani pesisir ketika ditanyakan peran pemerintah. Petani pun tidak pernah mengalami konflik tanah garapan. Petani tahu mana yang menjadi hak garapnya satu sama lain dan tidak pernah mengalami konflik status tanah, karena petani yang mengatur sendiri. Kepercayaan mereka antar setiap orang dan komunitas kelompok tani melampaui

JIKA TAMBANG DATANG KE KULON PROGO,



INI ...





... AKAN BERUBAH MENJADI INI

kepercayaan relasi para pebisnis yang yakin setelah disucikan di atas kontrak hukum bermaterai.

Saat ini lahan kritis itu sudah sangat subur dengan jerih empat puluh tahun lebih. Tumbuhan apapun mungkin hidup di atas pasir pantai melalui tangan dan perawatan bersama hidup mereka. Di atas pasir itu ragam tumbuhan holitikultura mampu ditanam sepanjang musim hujan maupun kemarau. Mulai dari cabe, terong, pari, jarak, kancang panjang, padi, jagung, semangka dan banyak lagi jenis sayuran ada di lahan pesisir pantai bertanah pasir sepanjang 25 KM, melalui tangan petani telah menghijaukan bumi. Mereka menanam dengan pengetahuan kolektif, baik melalui pengalaman mengenal teknologi modern dan juga kearifan lokal saat menentukan musim tanam, merawat hidup tumbuhan sampai memanen lahan.

Secara umum tanaman yang jadi komoditas utama petani ini adalah cabe. Namun mereka juga menanam yang lainnya secara musim berkala. Sampai hari ini setiap kelompok tani masih mendiskusikan kapan musim tanaman tertentu akan diawali dan dilanjutkan dengan tanaman lainnya. Setiap tahun para petani di masing-masing kelompok tani mendiskusikan musim tanam. Mereka berdebat berangkat dari berbagai perspektif, mulai dari kepercayaan terhadap sistem tanggalan jawa, keadaan alam baik tanah, laut dan langit, sampai kemungkinan bentrokan penumpukan panen dengan daerah lain. Berbagi pengetahuan dan menentukan hidup dari pasir tidak dilakukan sendiri, tapi berdasar diskusi setiap kelompok-kelompok tani yang mandiri satu sama lain. Melalui kelompok tani mandiri inilah banyak hal mulai ditentukan secara bersama-sama.

Pasir Ingin 'dimakan' Pengusaha dan Tuan Tanah

Tahun 1964 pernah dilakukan penelitian penyelidikan kandungan pasir dari Jurusan Geologi Univerisatas ITB. Penelitian yang dipimpin oleh Ir. Junus ini menyelidiki kandungan pasir besi dan air tanah di dalamnya. Saat itu mereka mengebor tanah sampai kedalaman 4-7 m. Ketika itu beberapa warga yang diminta membantu bekerja sebagai tenaga kasar dari daerah setempat menyimpan ingatan bahwa tanah pasir ini di dalamnya ada besi dan air.[3] Ingatan itu adalah awal yang dipakai masyarakat sekitar untuk memulai mengambil alih hidup mereka setelah 20 tahun

kemudian, semacam mencuri pengetahuan dari pihak lain. Iman Rejo, Pardiman dan Musdiwiyono berinisiatif mengajak warga bersama mencoba membuat sumur sebagai sumber hidup. Mereka menemukan air di dalam tanah, air tawar yang jelas tidak asin, bahkan sekalipun berada sekian meter dari bibir pantai selatan. Melalui sumur buatan, ditangan warga dusun lahan kritis dan mati tadi menjadi hidup.

Ingatan itu tapi menjadi berbeda ketika telah dicatatkan di dalam naskah akademis, kemudian dibaca oleh tuan tanah dan diketahui oleh pengusaha. Saat tanah itu mulai subur, memberi makan bahkan mencetak anak petani bersekolah di perguruan tinggi, saat itu juga pencerahan meloncat tiba-tiba di benak pengusaha dan pengklaim otoritas tanah di Kulon Progo. Persekutuan pengusaha dan pengklaim otoritas tanah ini juga ingin 'makan' pasir. Persekutuan mereka dalam korporasi bernama PT.JMM (Jogja Magasa Mining). Pada hari kamis, 6 Oktober 2005, pukul 20.15 WIB terdengar suara imajiner dalam mimpi petani, "Di dalam rahim kandungan pasir pesisir ada besi, sudah seharusnya dikeluarkan, dieksploitasi, dinikmati bukan saja oleh para petani, tapi oleh kita, tinggal kita bilang ini demi masyarakat luas, demi bangsa dan negara", begitu kira-kira suara dari ruang rapat imajiner dalam mimpi petani, saat detik sebelum penandatangan sebuah akta notaris PT Jogja Magasa Mining.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. menjalankan usaha dalam bidang pertambangan umum, termasuk pertambangan pasir besi, biji besi, pasir laut dan batu bara.

b. melakukan perdagangan, termasuk dagang impor, ekspor dan antar pulau (interinsulair), bertindak selaku agen perwakilan, agen tunggal, grosir, leveransir, distributor dan supplier(penyalur) dari hasil-hasil pertambagan seperti pasir besi, biji besi, pasir laut dan batu bara, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan pihak lain atas dasar komisi

c. mendirikan industry pengolahan dan pemrosesan hasil-hasil petambangan seperti pasir besi, biji besi, apsir laut dan batubara

d. menyediakan jasa dan pelayanan dalam bidang pertambangan

e. menyelenggarakan transportasi dan pengangkutan untuk hasil-hasil pertambangan di darat dengan menggunakan truk[4]

Berdasar bunyi akta notaris ini maka PT. JMM ini memiliki kuasa hukum yang dicatatkan kepada Negara untuk melakukan eksploitasi total atas usaha pertambangan.

Perusahaan PT.JMM ini memang baru terbentuk dan usaha mereka di bidang pertambangan memang belum pernah ada. Ada kebutuhan pengalaman eksploitasi tambang dan kebutuhan tambahan modal5, maka korporasi ini lantas penting mengandeng perusahan lain sebagai kerabat bisnisnya. Berdasar wawancara dengan Lutfi Hayder6 (Komisaris Jogja Magasa Iron), Indo Mines Limited7 ikut bergabung dan korporasi Australia Kimberly Diamond juga turut menanamkan modalnya bersama investor lainnya. Kolaborasi korporasi PT.Jogja Magasa Mining, Indo Mines Limited dan investor lain disebut JMI (Jogja Magasa Iron)8, tapi kemudian barubaru ini nama itu berubah lagi menjadi JMI (Jogja Magasa International).

Langkah persekutuan pengusaha dan pengklaim otoritas tanah Kulon Progo ini untuk mensukseskan eksploitasi tambang besi sudah sangat tersistematis. Menurut pengakuan Lutfi Hayder selaku Komisaris Jogja Magasa Iron mereka sudah mengumpulkan penggalangan dana yang besar, meski dunia saat ini sedang terkena resesi krisis ekonomi. Dana untuk melakukan studi kelayakan pun sudah tersedia, ada anggaran dana yang diperkirakan untuk 12-18 bulan.

Perlawanan Petani VS Korporasi

Awal tahun 2009 warga pesisir mulai resah dengan rencana proyek penambangan ini. Kegelisahan ini segera menyebar karena para petani menjadi cemas kehilangan alam yang selama ini mereka hidupkan. Mereka berbagi cerita dari orang perorang dan juga di kelompok tani. Sampai akhirnya kelompok-kelompok petani mandiri dari berbagai desa sepanjang pesisir berkumpul untuk berdiskusi. Suatu malam di bulan april, ratusan petani menjadi delegasi dari wilayah dan kelompok berkumpul untuk menentukan sikap. Malam itu para petani saling memberi pendapat dan menganalisa kegelisahan mereka tentang kabar-kabar rencana penambangan itu.

Informasi bukti valid soal rencana penambangan pasir besi di atas tanha hidup mereka diungkap malam itu. Diskusi mengerucut pada 3 opsi sikap. Pertama, petani menerima mutlak rencana penambangan itu. Kedua, petani menerima dengan syarat dan ketentuan tertentu. Ketiga, petani menolak mutlak rencana pembangan itu. Ternyata tak satu orang pun memilih opsi pilihan pertama dan tak satu orang pun memilih opsi kedua.

Seluruh petani malam itu menyatakan penolakan secara mutlak rencana berdirinya penambangan pasir besi di tanah hidup mereka. Malam itu juga para petani merancang strategi perjuangan penggagalan tambang besi. Pertama yang mereka lakukan adalah membentuk wadah bersama. Wadah ini bernama PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai). Mereka mengorganisasikan diri dengan struktur tidak biasa. Selain ada ketua, sekretaris dan bendahara serta wakil-wakilnya, mereka juga menetapkan para petani tua sebagai penasehat. Disamping itu ada juga yang menjadi koordinator lapangan dari setiap desa, semacam delegasi, uniknya koordinator ini tidak lebih dari 1 orang saja, dan orangnya sering berganti dengan sangat fleksibel. Setiap desa juga memiliki unit-unit PPLP otonom sendiri dengan struturnya masing-masing. Yang jelas satu hal, tidak ada pemegang otoritas tunggal di struktur PPLP. Seluruh masyarakat pesisir adalah anggota PPLP dan sikap atas berbagai informasi soal penambangan selalu berdasar atas rapat yang berangkat dari rapat unit sampai induk PPLP. Uniknya lagi tidak akan ditemukan dimana markas PPLP dan sekretariat induk ataupun unit PPLP, karena setap rumah di pesisir adalah tempat mereka untuk berkoordinasi.

PPLP selanjutnya mulai melancarkan banyak aksi. Awalnya mereka melakukan perlawanan tradisional melibatkan tetua dan pemuda dalam tradisi lokal seperti mujahadah, pengajian, ritual tanam petani dan tidur menjaga lahan pesisir. Upaya dialogis dan gerakan mereka mendeklarasikan penolakan tambang besi tidak ditanggapi santun oleh pihak korporasi dan juga pemerintah daerah yang memiliki kepentingan atas Pendapatan Anggaran Daerah. Diam-diam wilayah desa dipesisir disusupi intel dan preman-preman bayaran untuk menggertak masyarakat.

Sebelum puasa ramadhan, 24 Agustus 2007, petani bersepakat mengepung para otoritas daerah Kulon Progo. Petani mulai menggangu eksistensi simbol otoritas di daerah yang tidak pernah adil dan memahami aspirasi rakyat. Hari itu aksi petani sempat bentrok fisik dengan polisi dan ribuan orang itu berhasil masuk ke wilayah simbol kekuasaan kantor Pemkab Kulon Progo. Petani merobohkan pagar dan memaksa polisi untuk meminggir dari aksi maksa. Hari itu, tidak satupun pejabat teras daerah, apalagi Bupati menemui petani.

Petani dengan organisasi PPLP mengancam bupati 5 X 24 Jam untuk mengeluarkan pernyataan menggagalkan rencana penambangan. Aksi-aksi demontrasi petani terus berlangsung hingga saat ini. Mereka merancang strategi dan taktik demi menggagalkan penambangan besi di tanah pasir pesisir Kulon Progo.

Kasus perjuangan petani Kulon Progo merupakan salah satu contoh otentik perlawanan terhadap kekuasaan yang bersifat anti-politik, otonom, dan swakelola. Dipangkasnya keterlibatan para politisi dan lsm yang ingin masuk, telah menjadi semacam kesepakatan bersama bahwa perjuangan petani tidak boleh menggantungkan diri pada siapapun. Antara pasir dan besi yang terkandung di dalamnya, ada sebuah gejolak, sebuah gejolak yang takkan surut untuk berjuang melawan setiap bentuk eksploitasi dan dehumanisasi.

1. Imam Rejo
2. Imam Rejo
3. Imam Rejo
4. Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Jogja Magasa Mining No.40. Buntario Tigris Darmawa NG, SH, SE.
5. Dalam akta notaris dicatat jumlah total modal awal adalah Rp 600.000.000,-
6. Wawancara Tanggal 12 Maret 2009
7. Application For Contract of Works From Government of the Republic of Indonesia
8. Rencana Kerja 2009 JMI, Jogjakarta 12 Maret 2009

ditulis oleh Antasena

Tulisan ini juga pernah dipublikasikan di Amorfati #3



KRONOLOGI PERJUANGAN PETANI

- 1 April 2006

Masyarakat pesisir dari 4 kecamatan dan 10 desa yang berkepentingan mempertahankan fungsi ekosistem dan matapencaharian sebagai petani lahan pantai membentuk organisasi perjuangan yang bersifat independen, yaitu Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo (PPLP KP), dengan agenda utama penolakan rencana pertambangan pasir besi. Berikut adalah kronologi aksi yang terjadi berikutnya:

- 27 Agustus 2007

PPLP KP berdemonstrasi di Kantor Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo dengan tuntutan pembatalan proyek pertambangan pasir besi. Bupati (Toyo S. Dipo) dan Ketua DPRD Kulon Progo (Kasdiyono) menyetujui tuntutan masyarakat secara tertulis, dengan konsekuensi pengunduran diri.

- 1 Maret 2008

Warga Bugel melakukan aksi memblokir jalan menuju kawasan pesisir untuk kepentingan pengangkutan material bahan Pilot Project PT JMI Aksi ini terjadi karena Bupati dan Ketua DPRD Kulon Progo mengingkari kesepakatan dengan

masyarakat yang ditandatangani di depan ribuan warga Kulon Progo pada 27 Agustus 2007.

- 21 Juli 2008

Sebanyak 3000 massa PPLP KP berdemontrasi di Universitas Gadjah Mada menuntut penghentian kerjasama reklamasi lahan pascapenambangan oleh Fakultas Kehutanan UGM dengan P.T. JMI, dan tuntutan ini disetujui oleh Rektor UGM Prof. Soedjarwadi dan Dekan Fakultas Kehutanan UGM Prof. M. Na'iem dengan penandatangan surat pernyataan. Aksi ini terjadi karena UGM tidak memberi sikap secara resmi setelah PPLP KP mengirim surat permintaan klarifikasi sebanyak 3 kali.

- 23-25 Oktober 2008

Masyarakat pesisir menduduki kantor DPRD Kulon Progo untuk menuntut pembatalan proyek penambangan pasir besi karena berpotensi pada pelanggaran Hak Asazi Manusia. Dalam aksi ini, legislatif tidak bersedia menemui masyarakat. Kemudian, PPLP-KP meminta bantuan LBH DIY mengirimkan surat pengaduan ke KOMNAS HAM agar KOMNAS HAM meminta kejelasan sikap Gubernur DIY dari Pemerintah Kabupaten Kulon Progo tentang aspek HAM dalam proyek tersebut.

- 4 Februari 2008

Sejumlah perwakilan warga pesisir melakukan audiensi dengan Komisi VII DPR RI dan Kedutaan Besar Australia untuk meminta kejelasan identitas Indo Mines Ltd., pihak Kedutaan Besar Australia menyatakan ketidaktahuannya atas keterlibatan Indo Mines Ltd, dan memberikan keterangan bahwa alamat perusahaan Indo Mines Ltd. tidak sesuai dengan yang diinformasikan kepada publik.

- 3 - 6 Juni 2008

KOMNAS HAM telah melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap rencana proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo Yogyakarta. Pemantauan KOMNAS HAM menghasilkan beberapa rekomendasi yang menjelaskan bahwa berdasarkan data, informasi dan fakta proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo sangat berpotensi memicu terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), khususnya 1) hak atas tanah, 2) hak atas pekerjaan, 3) hak atas rasa aman, 4) hak atas informasi, dan 5) hak petani.

Menurut KOMNAS HAM, proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo juga telah menimbulkan keresahan sosial dan gangguan psikologis pada masyarakat pesisir karena proyek penambangan pasir besi di Kulon Progo meniadakan fungsi lahan sebagai sumber penghidupan Informasi pada sosialisasi memberi porsi lebih pada manfaat ekonomi menurut rencana investasi namun tidak menyampaikan risiko ekologi, sosial, politik, dan budaya. Ketimpangan informasi ini jelas melanggar Pasal 14 UU No. 39 Tahun 1999 yang menjelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi apapun dengan mempergunakan berbagai cara dan sarana yang tersedia.

Proses-proses dialog pernah diusahakan oleh masyarakat namun tidak menghasilkan titik temu karena keberpihakan pemerintah pada investor lebih kuat (PT JMI menjanjikan royalty sebesar 3 % per tahun).
Sri Sultan Hamengku Buwono X adalah peran sentral karena menjabat sebagai GUbernur, Raja, dan Pengusaha tidak memberi jalan bagi pengelolaan sumberdaya alam secara kolaboratif, namun hanya menyerahkan persoalan ini pada proses politik di tingkat kabupaten. Nuansa nepotisme PT JMI dan dominansi kepentingan pribadi elit kasultanan dan paku alaman pada proyek ini kuat ditandai dengan keberadaan Pembayun (puteri Sultan) dan kerabatnya sebagai komisaris, hal ini dibuktikan dengan akte notaries PT JMM (sebelum berubah menjadi JMI).

- 27 Oktober 2008

Sekumpulan massa (sekitar 300 orang) dari luar kawasan konflik melakukan perusakan dan pembakaran 7 posko penolakan proyek dan 1 rumah milik warga pesisir yang menolak pertambangan. Peristiwa ini terdokumentasikan melalui media televisi swasta, menurut kesaksian dan dokumentasi lapangan, satuan kepolisian yang siap di tempat kejadian melakukan pembiaran dan pengarahan tindakan kekerasan massa tidak bertanggungjawab tersebut.

- 19 Juli 2009

PPLP KP mengadakan pertemuan di LBH membahas kasus kriminalisasi terhadap Tukijo atas tuduhan pencemaran nama baik Kepala Dusun Bedoyo, Isdiyanto, karena Tukijo menanyakan tujuan pendataan tanah warga.

- 20 Oktober 2009

Konsultasi publik KA ANDAL oleh pemrakarsa yang tidak melibatkan masyarakat terundang dan tidak menampung aspirasi masyarakat terdampak. Konsultasi publik ini diwarnai aksi pemukulan dan penembakan gas air mata, jumlah terbesar korban kekerasan aparat negara adalah kaum perempuan.

- April 2010

Warga mengirimkan surat pernyataan sikap penolakan rencana pertambangan pasir besi kepada Presiden RI.

- Mei 2010

Kunjungan ESDM di Bugel untuk investigasi permasalahan sosial di tingkat masyarakat terkait penolakan rencana pertambangan pasir besi.
Warga mengirim surat kepada DPRD DIY yang isinya menuntut DPRD DIY mengusut dugaan skandal perundang-undangan dalam proses penyusunan Perda No 2 Tahun 2010 tentang RTRWP DIY 2009-2029 oleh Pemerintah Propinsi DIY (Gubernur).

- Juni 2010

Warga berkirim surat kepada DPRD untuk mengajukan pembatalan PERDA No 2 Tahun 2010 karena secara hukum melanggar UU NO 10 Tahun 2004 dan Permendagri No 28 Tahun 2008.

- 15 Desember 2010

Aksi rapat akbar menolak rencana pertambangan pasir besi bertepatan dengan penilaian dokumen KA ANDAL di Bugel.

- 16 Desember 2010

Aksi langsung warga menghentikan tindakan yang meresahkan masyarakat yang dilakukan oleh oknum Pakualaman di Bugel datang 6 mobil tanpa seizin warga.

- 17 Desember 2010

Aksi rakyat petani melakukan penutupan Pilot Project di Gupit setelah 3 tahun beroperasi tanpa mengindahkan kepentingan lingkungan.

- 9 Februari 2011

Mediasi oleh KOMNAS HAM di Bugel, menghasilkan rekomendasi deadlock untuk konteks mediasi (mempertemukan kepentingan para pihak).



WAWANCARA: WIDODO

Widodo adalah salah satu petani pesisir Kulon Progo yang dulu pernah memutuskan untuk mengembara ke negeri seberang mengadu nasib menjadi TKI (Tenaga Kerja Indonesia), seperti yang banyak dilakukan oleh pemuda-pemuda dari seluruh sudut pedesaan di Indonesia. Namun, sejak wajah pesisir pantai selatan Kulon Progo berubah hijau dan melimpah ruah dengan hasil pertanianya karena kegigihan petani-petani mengolah gurun pasir yang awalnya gersang menjadi subur, Widodo dan banyak pemuda lain yang mengembara menjadi TKI di luar negeri memilih pulang dan bertani, meneruskan warisan tradisi leluhur. Sampai saat ini, Widodo bersama dengan ribuan petani pesisir pantai selatan Kulon Progo yang tergabung dalam PPLP-KP (Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo, Yogyakarta terus berjuang melawan keserakahan kapital dan kekuasaan yang akan menggusur lahan pertanian mereka dengan tambang pasir besi.

1. Bagaimana perasaan anda tentang keadaan perjuangan petani di pesisir selatan pantai Kulon Progo saat ini?

   Secara umum banyak hal yang kami rasakan dalam perjuangan ini. Satu, kami bisa belajar bahwa ternyata perjuangan mempertahankan tanah itu sangat penting sekali dalam kehidupan kami. Jadi, kalau berbicara tentang perjuangan, logika belajar itu sangat penting. Yang ke dua, merasa tertekan. Tertekan karena sebetulnya kehidupan kami sudah enak, sudah santai. Akan tetapi disisi lain Negara ini memberikan sebuah tekanan moral dan tekanan fisik terhadap kami, tentang bagaimana kami harus menikmati hidup yang tidak kami inginkan, seperti itu. Jadi, banyaklah manfaat yang bisa kita ambil dari pada perjuangan dimasyarakat pesisir Kulon Progo ini.

2. Apakah anda merasa bahwa PPLP (Paguyuban Petani Lahan Pantai) Kulon Progo memiliki dukungan yang cukup dan solidaritas dari petani lain di Indonesia dan dari orang lain di dunia dalam perjuangan penolakan tambang pasir besi?

Itu relatif ya, sebenarnya kalau dukungan sih sudah banyak, petani-petani lain yang juga mendukung perjuangan kami. Akan tetapi, menurut kami itu masih kurang. Keinginan kami, sebetulnya bahwa perjuangan di Kulon Progo ini adalah juga merupakan kasus semua petani yang ada di Indonesia. Cuma, ditingkatan kesadaran petani lain itu mungkin masih kurang. Tapi, kalau dikatakan banyak atau tidaknya solidaritas, kita tetap masih kurang dukungan. Garis besarnya seperti itu. Lalu untuk solidaritas internasional juga, sebetulnya sudah banyak. Cuma untuk memperkuat solidaritasnya itu kita merasa masih kurang. Karena sebetulnya kita bisa merasakan sendiri bahwa tekanan internasional itu sangat penting. Sangat membantu pergerakan kami disini. Akan tetapi, kami belum puas karena perjuangan ini belum 100% berhasil. Jadi, masih kuranglah untuk solidaritas semuanya, baik untuk pentani lokal ataupun solidaritas internasionalnya.

3. Kalau pendapat anda, masih kurangnya dukungan dari gerakan petani lokal terhadap perjuangan petani di kulon progo ataupun dukungan dari kelompok-kelompok lain itu penyebabnya karena apa mas?

Itu penyebabnya banyak, karena aku melihat bahwa gerakan tani di Indonesia, katakanlah bukan semacam gerakan murni dari petani. Saya melihat bahwa disitu, setiap petani akan bergerak pasti ada sesuatu, ada kekuatan lain yang justru ingin mengendalikan gerakan tani, itu di Indonesia. Saat kita mau berjejaring, saling bersolidaritas, itu seakan-akan ada tiran yang menghalangi. Entah itu apa. Saya melihatnya bahwa rata-rata gerakan tani, ada yang mengendalikan, kecuali saya nilai ya di PPLP ini kayaknya tidak ada yang mengendalikan.

4. Menurut anda, hal apa yang paling penting bagi fokus para petani dalam perjuangan menolak tambang pasir besi??

Fokus yang paling penting bagi kita yang pertama adalah menanam, merawat dan memanen. Karena kalau kita meninggalkan itu semua namanya bukan petani lagi. Itu, yang paling penting. Tiga hal tadi itu katakanlah sebagai dasar perjuangan kita. Yang ke dua, fokusnya adalah tentang bagaimana kita bisa mengabarkan bahwa disini sedang terjadi perjuangan melawan penindasan. Nah untuk mengabarkan itu kan penting bagi kita untuk membangun jaringan. Artinya, semua orang harus tahu, dimanapun, bahwa di Kulon Progo sedang terjadi kasus, gitu. Yang ke tiga, karena untuk melawan penindasan dan mempertahankan hak itu selalu bersinggungan dengan hukum formal, advokat itu penting. Ketika kita, misalnya terjerat sebuah kasus, advokat bisa berperan. Walaupun saya ada keraguan, sehebat apapun advokat akan tetap kalah.

5. Menurut anda bagaimana masalah tentang proyek tambang pasir besi ini akan mempengaruhi generasi masa depan petani?

Ya ini pasti sangat berpengaruh sekali. Tidak hanya generasi masa depan petani. Tapi juga sangat berpengaruh terhadap semua hal kehidupan di pesisir sini. Karena itu bisa merubah semua hal. Hari ini kita sudah baik-baik bertani. Semua bisa berkumpul, bisa berinteraksi dengan sesama petani. Mewujudkan sebuah kehidupan yang harmonis. Kehidupan sosial terhadap semuanya itu sudah baik. Akan tetapi ketika tambang ini berjalan itu semuanya pasti akan hancur. Akan merusak semua aspek kehidupan sosial dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Selanjutnya tentang bagaimana mempertahankanya, kita tetap mengatakan bahwa kasus ini adalah kasus kita bersama. Jadi, katakanlah dari generasi yang tua sampai muda bahkan anak-anak, hari ini dan selamanya harus belajar tentang bagaimana untuk mempertahankan hidup kita. Masalah regenerasi, kita tetap akan mendidik secara alam. Bahwa, pertanian itu penting untuk kehidupan karena disitu tidak merusak alam, tidak merusak lingkungan dan sebagainya.

6. Apakah anda bisa menceritakan sedikit kira-kira potensi ancaman proyek tambang pasir besi terhadap lingkungan itu seperti apa?

Wah itu banyak sekali. Dan sebetulnya ini sudah umum untuk diketahui. Ini kan pantai ya, kalau tambang itu berjalan, jelas ekosistem pantai akan rusak. Kita gak tahu kapan akan terjadi bencana alam, misalnya seperti angin ribut, gelombang laut besar sampai tsunami atau gempa bumi. Bagaimana kalau ekosistem pantai sudah rusak? Padahal fungsi ekosistem ini penting untuk menopang aktivitas kehidupan dan bisa memperkecil daya rusak dari bencana alam. Dan kita hidup disini itu dilindungi alam. Nah ketika alam itu dirusak, siapa yang akan melindungi kehidupan dipantai dan dimuka bumi ini? Itu tentang perusakan lingkungan. Perusakan sosial lebih banyak lagi, seperti yang saya ceritakan tadi. Tentang ekonomi apalagi. Dengan datangnya pemodal yang pasti uangnya besar-besar. Pasti nanti orang-orang pribumi sini akan tergusur semuanya. Karena para pemodal tidak pernah berfikir tentang kehidupan sosial, tetapi mereka hanya berfikir tentang bagaimana investasi akan cepat berkembang dan mendapat keuntungan yang sebesar-besarnya. Mereka mikirnya seperti itu. Kapitalis itu namanya!

7. Ini telah menjadi perjuangan beberapa tahun, sudah jalan 7 tahun. Apakah anda merasa bahwa perjuangan rakyat akan berlanjut dan terus memperjuangkan untuk tahun-tahun yang akan datang?

Kalau saya yakin tetap sampai kapan pun. Karena saya mencintai tanah saya. Saya berfikir bahwa tanah saya ini ya nyawa saya. Dan saya kira, orang pesisir semuanya berfikir seperti itu. Jadi, ketika tanah ini dikeruk misalnya ya itu berarti sama saja menyerahkan kehidupan ini terhadap orang lain. Orang lain yang saya maksudkan disini katakanlah penambang. Berarti kehidupan petani itu diserahkan kepada penambang. Sehingga kita yakin bahwa perjuangan penolakan tambang pasir besi ini akan tetap berjalan terus, sampai kapanpun, sampai kapanpun!

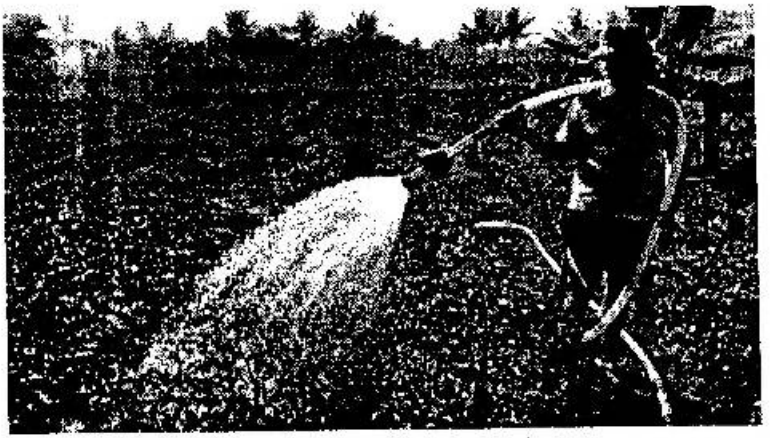
8. Mengapa anda berfikir atau yakin para petani begitu siap dan bersedia untuk memperjuangkan tanah ini? Apa arti tanah bagi para petani lokal di kulon progo?

Ini merupakan pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Penjelasannya sangat lebar sekali menurut saya. Karena tanah bagi kami adalah hidup kami, seperti yang saya katakan tadi. Kehidupan ini tidak bisa ditukar dengan apapun. Apalagi materi, materi yang dijanjikan negara atau pemodal itu tidak akan bisa. Tidak akan bisa memberikan kami kesejahteraan, itu sudah jelas. Nah ketika kita berb cara tentang tanah maka kita juga berbicara tentang kehidupan. Ketika kita berbicara tentang kehidupan, semuanya itu pasti berkaitan yaitu dengan kehidupan sosial, budaya, lingkungan, semuanya saling bersangkutan. Artinya, kita juga bisa ngomong bahwa kami disini sudah sejahtera dan kesejahteraan kami itu tidak bisa diukur dengan apapun. Apalagi ,dengan perhitungan materi versinya negara atau orang kaya. Itu nggak bisa. Biarpun misalnya tiap hari kita cuma di suruh bermain-main terus, pergi kemanapun. Kita sudah merasa sejahtera dengan kehidupan seperti ini dan kesejahteraan ini tidak bisa diukur dengan apapun.

9. Anda tadi bercerita bahwa tidak percaya dengan adanya investasi atau penanaman modal yang akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat. Bukankah banyak masyarakat yang percaya bahwa dengan adanya investasi itu akan mendatangkan kesejahteraan, mendatangkan kelimpahan ekonomi. Kenapa anda tidak percaya terhadap hal itu?

Itu-itu yang bicara siapa? Yang bicara versi seperti itu siapa? Saya pengen tahu. Yang bicara itu satu, pasti orang-orang pemerintahan. Terus yang ke dua, itu pasti pengusaha dan yang ke tiga orang-orang yang istilahnya menjadi penjilat pantat-pantat penguasa dan pengusaha. Mereka bukanlah pejuang hidup yang mandiri. Mana sih tambang yang bisa mensejahterakan orang kecil seperti saya ini? Nggak ada. Apalagi bicara tentang negara, bisanya apa sih? Cuma bikin aturan, menangkap orang-orang yang sedang





MAS WIDODO DI KEBUNNYA

berjuang, seperti Pak Tukijo itu. Itu nggak bisa. Jadi, orang yang ngomong seperti itu ya orang yang hanya ditipu. Nggak pernah ada bukti ketika suatu tempat ditambang terus jadi sejahtera. Freeport dikatakan selalu bisa mensejahterakan, tapi kenyataannya tidak seperti itu. Yang sejahtera itu ya pemodal, yang punya uang, yang punya jabatan. Mereka yang sejahtera. Orang-orang yang punya tanah disitu semuanya tersingkir. Dan kita tidak mau seperti itu. Kita mau merdeka diatas tanah kita sendiri. Saya lebih percaya ketika saya mengolah tanah saya sendiri karena itu lebih kongkrit. Tidak perlu memakai aturan-aturan yang ini-itu-ini-itu yang terjebak dalam diteori. Intinya bahwa kehidupan kami itu sudah sejahtera dan aman. Cuma hari ini, penguasa dan pemodal mau menggusur kami. Tapi, sampai kapanpun kami akan tetap bertahan dan melawan. Tidak hanya sampai disitu saja. Bahkan, saat saya ke Lumajang, Jawa Timur, petani pesisir disana sudah sejahtera dan aman. Mereka sudah bisa menemukan cara hidup sesuai dengan model mereka sendiri dan sesuai dengan kesejahteraan yang mereka harapkan. Tapi lagi-lagi kehidupan mereka itu juga mau dirusak oleh negara dan pemodal. Itu contoh yang benar-benar saya lihat. Terus, contoh lainnya adalah di Kebumen, petani pesisir sana sudah bisa hidup mandiri dengan bertani. Tapi, disana TNI (Tentara Nasional Indonesia) meng-klaim secara sepihak bahwa tanah itu adalah tanah TNI. Padahal sudah jelas bahwa tanah-tanah itu merupakan tanah masyarakat, sudah bersertifikat. Itu kan jadi hal yang lucu dan aneh. Makanya kenapa, saya tidak pernah percaya dengan yang namanya negara. Karena ya itu tadi, bisanya hanya melindungi pemodal bukan melindungi rasa aman masyarakatnya. Selain itu masih banyak lagi, seperti di Porong, Sidoarjo, kasus lumpur Lapindo yang menyengsarakan masyarakat. Itu kan ulah-ulah para pemodal, kenapa kita harus tertipu. Contoh juga udah banyak dan kita nggak mau seperti itu. Ya, kita akan tetap seperti ini, bertahan dan melawan.

10. Kita tahu bahwa Kesultanan dan Pakualaman Yogyakarta mempunyai kepentingan dalam proyek tambang pasir besi ini karena selain beberapa orang keluarga keraton mempunyai kedudukan penting dalam perusahaan PT JMI (Jogja

Magasa International) mereka juga bagian dari pemilik saham. Namun disisi yang lain, banyak orang yang masih percaya bahwa keraton sangat melindungi masyarakat dan menjunjung keadilan. Tapi citra tersebut bertolak belakang dengan adanya bukti keterlibatan mereka dalam proyek tambang pasir besi yang akan menggusur ribuan petani pesisir Kulon Progo. Bagaimana pandangan anda tentang hal ini?

Keraton itu apa sih? Itu kan katakanlah institusi yang nggak jelas menurut saya. Karena ketika mereka berbicara budaya, mereka berbicara apapun itu seharusnya melihat fakta lapangan bahwa sesungguhnya keraton itu ya hanya simbol untuk menutupi kebobrokan institusi saja. Sehingga, banyak orang melihat bahwa keraton itu adalah simbol yang baik, akan tetapi ya seperti itu tadi, simbol-simbol itu semuanya untuk menutupi kebusukannya saja. Ya ini bukti nyata bahwa orang-orang keraton itu jelas mau menggusur warga pesisir Kulon Progo dari lahan kehidupannya yang nota bene adalah warga masyarakatnya sendiri. Dan itu bukti bahwa ternyata kekuasaan sebagai alat penindas. Tapi kalau untuk mensejahterakan, ah...saya tidak pernah percaya.

II. Bisa menceritakan bentuk-bentuk atau proses-proses perjuangan petani pesisir Kulon Progo yang tergabung di PPLP yang sudah dilakukan selama 7 tahun ini?

Itu sudah banyak sekali. Bahkan saya sendiri sampai lupa berapa kali petani itu melakukan protes terhadap pemerintah. Kita melakukan gerakan ini bahkan sampai turun ke jalan dengan aksi-aksi demonstrasi. Saya juga lupa sampai berapa kali kita melakukan aksi turun ke jalan menuntut lembaga-lembaga pemerintah, minimal mendengarkan saja aksi-aksi kita, suara-suara rakyat. Tetapi ya, sampai hari ini mereka masih ngotot untuk menambang. Contohnya, kami sudah pernah melakukan aksi demo di pemerintah Kabupaten Kulon Progo, di DPRD kabupaten, di pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta bahkan sampai DPR RI pernah kita datangi juga. Terus kalau masalah surat menyurat, kita juga lupa berapa kali kita menyurati mereka

bahkan, sampai menyurati Presiden itu entah 2-3 kali. Ya, kita tak pernah tahu, apakah surat-surat itu hanya dipakai untuk bungkus tempe. Saya juga yakin Presiden tidak akan mau membaca surat dari petani. Dan itu bukti bahwa hari ini tidak ada perjuangan melalui legal-legal formal yang berhasil itu tidak ada, semuanya itu teori. Saya bisa ngomong seperti ini itu karena saya sudah membuktikan sendiri, bagaimana kita membuat surat kepada siapapun, aksi dimanapun, ngomong didepan siapapun, ternyata semuanya omong kosong. Mereka hanya menjanjikan saja, realitasnya tidak ada, bahkan kalau di DPR RI itu ya, saya pernah ke sana mungkin sampai 5 kali, mereka hanya menjanjikan saja. Bahkan saat mereka datang ke sini, bukannya untuk melihat nasib rakyatnya, mereka yang dari DPR RI Komisi 7 itu malah melihat bagaimana baiknya penambangan, bukan bagaimana untuk membela kepentingan masyarakatnya. Sehingga kami sudah tidak percaya dengan sistem-sistem legal formal perjuangan, karena tidak berhasil, semua pernah kita coba. Apalagi tentang teori-teori LSM yang saya pikir tidak jelas karena kalau saya melihat mereka itu bukan menolak, tapi justru mereka menawarkan untuk win-win solution (solusi yang sama-sama menguntungkan). Maksudnya sama-sama menguntungkan bagi negara dan para pemodal bukan menguntungkan bagi masyarakatnya. Sehingga kami tidak pernah percaya terhadap mereka. Dan bukti bahwa semuanya itu gagal ya banyak perjuangan petani di Indonesia yang gagal dengan menempuh cara-cara seperti itu. Kalaupun berhasil semuanya itu semu karena, petani tidak bisa benar-benar mandiri untuk mengelola kehidupan mereka sendiri

12. Pertanyaan terakhir, kira-kira hal apa yang terbaik yang perlu dilakukan, baik untuk petani yang ada dipesisir Kulon Progo maupun gerakan petani atau gerakan masyarakat pada umumnya yang sampai saat ini masih berjuang untuk melawan penindasan?

Itu sebetulnya cuma simpel dalam hal perkataan. Jangan pernah nasib kita, kita serahkan pada orang lain. Nasib kita yang menentukan adalah kita sendiri, bukan siapa-siapa, bukan DPR, bukan birokrat, bukan politisi, apalagi LSM. Jangan sampai itu diberikan kepada mereka. Yang menentukan

berjalannya perjuangan kita ya kita sendiri. Okelah misalnya kita berbagi dengan siapapun, kita sangat terbuka, karena untuk kepentingan mengkampanyekan masalah-masalah yang terjadi. Namun untuk masalah pengambilan keputusan, tetap ada ditangan masyarakat. Ini bukan hanya untuk gerakan petani saja, tapi juga sangat penting untuk semua gerakan. Dari gerakan buruh sampai gerakan lainnya. Penyelesaian kasus-kasus agraria di Indonesia kebanyakan diserahkan kepada para politisi dan LSM, jadinya itu ya hancur. Baiknya kita berjuang ya secara mandiri. Dan yang penting tiga hal yang saya sebutkan diawal-awal pembicaraan kita, membangun kekuatan masyarakat ditingkatan paling bawah, bahwa kita harus sadar perjuangan ini adalah milik kita. Yang ke dua, bagaimana kita membangun jaringan dengan teman-teman yang peduli dan betul-betul mau diajak berfikir bersama untuk kepentingan orang banyak. Kita membuka kran jaringan kampanye diluar sehingga kasus ini jangan sampai dilokalisir, bahwa kasus ini adalah kasus kita semua, itu fungsi pentingnya kenapa kita harus membangun jaringan yang kuat. Tetapi dalam tanda kutip, penghubung-penghubung jaringan itu justru jangan sampai malah menjadi makelar. Secara manusiawi dan akal sehat kita bisa menganalisa tentang tujuan orang-orang yang masuk diranah konflik. Yang ke tiga, advokat, ketika kita bersentuhan dengan hukum, minimal ada yang back up. Biar yang terkena kasus itu agak tenang, walaupun itu pasti akan kalah. Kalau kita mau menang ya harus memakai hukum sendiri, hukum adat dan hukum petani untuk menyelesaikan masalah dengan siapapun.

13. Kata-kata terakhir untuk penyemangat?

Tetap perjuangan ini adalah perjuangan kita. Jangan kita serahkan pada siapapun dan tetap tolak tambang pasir besi sampai kapanpun dan dimanapun!






PPLP
PPLP-KN



AKSI PROTES PETANI YANG TERGABUNG DALAM PPLP
MELAWAN TAMBANG

apapun; bahkan untuk sekedar meminta penjelasan atau penculikannya ini, atau mengontak keluarganya.

Sekitar 15 menit setelah penculikan Tukijo, istrinya menyadari bahwa ia menghilang, dan mulai khawatir mengapa suaminya tak berada di ladang. Pada tempat dimana ia beristirahat sebelumnya, hanya terdapat sandal miliknya. Istri Tukijo kemudian mencarinya ke ladang-ladang yang lain, dan ketika ia tak berhasil menemukannya, ia pulang dan bertanya kepada teman-teman dekatnya apakah mereka mengetahui dimana Tukijo. Tapi tentu saja tak ada yang tahu. Akhirnya salah satu dari teman dekat mereka berhasil mengontaknya lewat telefon genggam. Mereka hanya bisa berbicara dengan singkat; namun cukup bagi Tukijo untuk memberitahu bahwa ia tengah dibawa ke Kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berita atas pemaksaan penculikannya menyebar dengan cepat di seluruh komunitas Kulon Progo, namun masih tidak ada kejelasan atas pelanggaran apakah kemungkinan Tukijo ditahan. Salah satu anggota PPLP yang mengontak Tukijo mendapat berita bahwa tepat setelah ia tiba di Kantor Polda DIY ia langsung di interogasi. Pada pukul 13.00, seluruh anggota PPLP dan komunitas Kulon Progo telah berkumpul di rumah anggota keluarga Tukijo. Mereka menunggu kabar selanjutnya dari Jogja dengan cemas, baik langsung dari Tukijo sendiri atau dari badan hukum yang telah dikontak pada pukul 12.00, atau dari simpatisan manapun yang mencoba menemuinya di Markas Kepolisian Jogjakarta.

Meskipun Kepolisian mencoba untuk melakukan proses selanjutnya berdasarkan prosedur legal; PPLP masih menuntun kepolisian karena menggunakan penipuan untuk menahan Tujio, tanpa pemberitahuan sebelum terjadinya penangkapan, atau kepada keluarganya setelah penangkapan itu terjadi.

Penangkapan ini adalah pelanggaran dari Undang-undang tahun 1981, No.18 . Pasal 17 menyatakan bahwa: "Prosedur dari penangkapan seseorang yang dituduh melakukan aksi kriminal harus didasarkan kepada bukti yang jelas dan tak terbantahkan." Hingga saat kronologi ini dituliskan, tak ada bukti jelas apapun yang diberikan oleh kepolisian untuk membenarkan penangkapan mendadak mereka atas Tukijo.

apapun; bahkan untuk sekedar meminta penjelasan atau penculikannya ini, atau mengontak keluarganya.

Sekitar 15 menit setelah penculikan Tukijo, istrinya menyadari bahwa ia menghilang, dan mulai khawatir mengapa suaminya tak berada di ladang. Pada tempat dimana ia beristirahat sebelumnya, hanya terdapat sandal miliknya. Istri Tukijo kemudian mencarinya ke ladang-ladang yang lain, dan ketika ia tak berhasil menemukannya, ia pulang dan bertanya kepada teman-teman dekatnya apakah mereka mengetahui dimana Tukijo. Tapi tentu saja tak ada yang tahu. Akhirnya salah satu dari teman dekat mereka berhasil mengontaknya lewat telefon genggam. Mereka hanya bisa berbicara dengan singkat; namun cukup bagi Tukijo untuk memberitahu bahwa ia tengah dibawa ke Kantor Polda Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berita atas pemaksaan penculikannya menyebar dengan cepat di seluruh komunitas Kulon Progo, namun masih tidak ada kejelasan atas pelanggaran apakah kemungkinan Tukijo ditahan. Salah satu anggota PPLP yang mengontak Tukijo mendapat berita bahwa tepat setelah ia tiba di Kantor Polda DIY ia langsung di interogasi. Pada pukul 13.00, seluruh anggota PPLP dan komunitas Kulon Progo telah berkumpul di rumah anggota keluarga Tukijo. Mereka menunggu kabar selanjutnya dari Jogja dengan cemas, baik langsung dari Tukijo sendiri atau dari badan hukum yang telah dikontak pada pukul 12.00, atau dari simpatisan manapun yang mencoba menemuinya di Markas Kepolisian Jogjakarta.

Meskipun Kepolisian mencoba untuk melakukan proses selanjutnya berdasarkan prosedur legal; PPLP masih menuntun kepolisian karena menggunakan penipuan untuk menahan Tujio, tanpa pemberitahuan sebelum terjadinya penangkapan, atau kepada keluarganya setelah penangkapan itu terjadi.

Penangkapan ini adalah pelanggaran dari Undang-undang tahun 1981, No.18 . Pasal 17 menyatakan bahwa: "Prosedur dari penangkapan seseorang yang dituduh melakukan aksi kriminal harus didasarkan kepada bukti yang jelas dan tak terbantahkan." Hingga saat kronologi ini dituliskan, tak ada bukti jelas apapun yang diberikan oleh kepolisian untuk membenarkan penangkapan mendadak mereka atas Tukijo.

membungkamnya lalu menjejalinya dengan semua tuduhan pelanggaran hukum itu. Mereka begitu cemas tak akan mampu memberikan bukti yang memadai bagi tuduhan-tuduhan mereka, dan karena itu langsung melakukan maraton interogasi secepatnya.
Pasal 19 (1) menyatakan bahwa: Penangkapan seperti yang telah disebutkan di pasal 17, hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam dari masa penangkapan.
Apabila Tukijo ditahan lebih dari 24 jam (dihitung semenjak pukul 11 siang pada 1 Mei 2011), maka aparat Kepolisian harus melepaskannya, berdasarkan prosedur hukum tersebut. Terutama karena mereka bahkan tak memiliki bukti yang memadai untuk mendukung tuduhan-tuduhan mereka.

Menipu kemudian menculik Tukijo adalah sebuah serangan strategis bagi komunitas Kulon Progo secara keseluruhan. Tukijo adalah seorang sosok yang memiliki pengaruh besar di dalam komunitasnya, dan merupakan seorang yang sangat dikenal sebagai tokoh yang vokal memperjuangkan hak-hak para petani. Gerakan yang terkalkulasi dengan baik ini diniatkan untuk menyebar ketakutan, panik dan rasa bingung diantara para petani. Perusahaan pertambangan, dibantu oleh satuan Kepolisian sekali lagi ingin menunjukkan bahwa mereka bisa dan akan selalu menggunakan segala cara, tanpa batasan, legal ataupun ilegal, untuk mencegah para petani mempertahankan hak, komunitas, tanah, budaya, dan kehidupan mereka.

Kulon Progo, 2 Mei 2011, 21.00

Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo/PPLP KP

*****Diaptasi dari komunike orisinil PPLP untuk publikasi ini. 24 June 2012. *****

membungkamnya lalu menjejalinya dengan semua tuduhan pelanggaran hukum itu. Mereka begitu cemas tak akan mampu memberikan bukti yang memadai bagi tuduhan-tuduhan mereka, dan karena itu langsung melakukan maraton interogasi secepatnya.
Pasal 19 (1) menyatakan bahwa: Penangkapan seperti yang telah disebutkan di pasal 17, hanya dapat dilakukan dalam waktu 24 jam dari masa penangkapan.
Apabila Tukijo ditahan lebih dari 24 jam (dihitung semenjak pukul 11 siang pada 1 Mei 2011), maka aparat Kepolisian harus melepaskannya, berdasarkan prosedur hukum tersebut. Terutama karena mereka bahkan tak memiliki bukti yang memadai untuk mendukung tuduhan-tuduhan mereka.

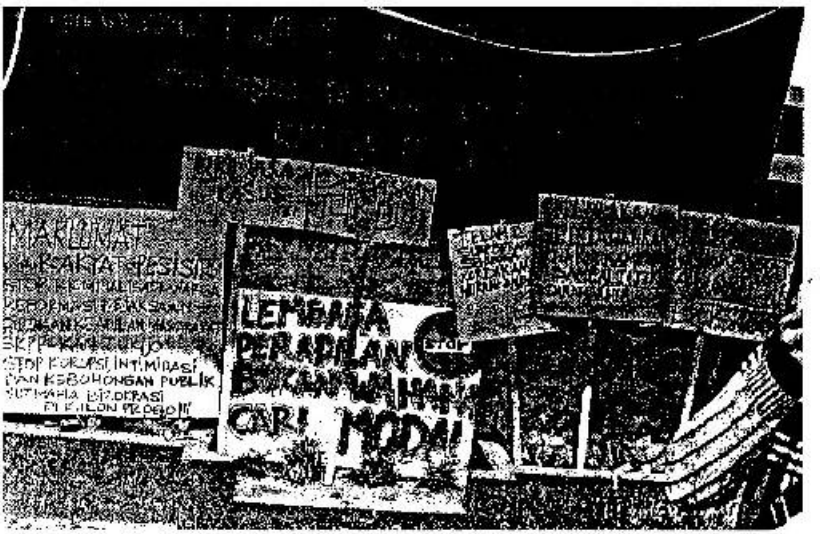
Menipu kemudian menculik Tukijo adalah sebuah serangan strategis bagi komunitas Kulon Progo secara keseluruhan. Tukijo adalah seorang sosok yang memiliki pengaruh besar di dalam komunitasnya, dan merupakan seorang yang sangat dikenal sebagai tokoh yang vokal memperjuangkan hak-hak para petani. Gerakan yang terkalkulasi dengan baik ini diniatkan untuk menyebar ketakutan, panik dan rasa bingung diantara para petani. Perusahaan pertambangan, dibantu oleh satuan Kepolisian sekali lagi ingin menunjukkan bahwa mereka bisa dan akan selalu menggunakan segala cara, tanpa batasan, legal ataupun ilegal, untuk mencegah para petani mempertahankan hak, komunitas, tanah, budaya, dan kehidupan mereka.

Kulon Progo, 2 Mei 2011, 21.00

Paguyuban Petani Lahan Pantai Kulon Progo/PPLP KP

*****Diaptasi dari komunike orisinil PPLP untuk publikasi ini. 24 June 2012. *****


TUKIJO
PEJUANG
PETANI


MAKMUR
LEMBAGA
PERADILAN
CARI
MODAL

WAWANCARA – IBU SURATINEM

Istri Tukijo (Suratinem, 40 tahun) sampai sekarang bekerja ditanah sendiri selama lebih dari setahun sementara suaminya di dalam penjara menjalani hukuman yang tidak adil karena perjuangan kerasnya berbicara menentang keserakahan korporasi dan korupsi. Pada saat wawancara ini, Tukijo tetap tidak adil dipenjarakan. Dan istrinya sehari-hari tanpa keberadaan, bantuan dan dukungan dari suaminya.

1. Ketika Anda pertama kali menyadari Tukijo hilang, apa yang anda pikirkan akan terjadi pada Tukijo pada waktu itu?

   Lebih baik saya cerita sedikit awal kejadian pada waktu itu. Saat itu saya diminta untuk menyiram sama bapak. Lalu saya siram. Terus saya bilang ke bapak kalau nanti saya perlu digantiin siram karena tangan saya sakit dan bapak bilang iya. Akhirnya hampir selesai siram kok bapak belum juga gantiin saya. Saya cari-cari bapak kok nggak ada. Terus saya tanya ke istrinya pak Kinteng (namanya Dwi), terus dia bilang mungkin saja dia di kolam. Terus Dwi menelpon pak Cokro yang ada di kolam, tapi dia menjawab kalau pak Tukijo tidak ada di kolam. Terus akhirnya Dwi langsung menelpon pak Tukijo dan menanyakan "kamu ke mana aja, dicariin istrimu kok nggak ada?" dan bapak bilang "saya dibawa lari sama pak polisi ke Polda Yogyakarta." Setelah dengar kabar itu saya sangat panik sekali, saya dan dwi (istri pak kinteng) tanya ke pak tukijo, "kenapa kamu kok diculik dan dibawa ke Polda?, apa masalahnya?." Tapi bapak menjawab kalau dia juga tidak tahu, awalnya dia cuma diajak masuk ke dalam mobil untuk ngobrol-ngobrol, tapi kok akhirnya diculik ke Polda. Waktu itu saya mikirnya sudah yang macam-macam, keluarga saya itu kan banyak sekali utangnya pada waktu itu. Terus saya mikirnya, kalau nanti bapak sampai di penjara, apa terus saya bisa membayar hutang? Pikiran saya ya pokoknya macem-macem, campur aduk lah. Ya seperti apalah beratnya kalau ditinggal seorang

suami, banyak utang, kerjaan hanya orang tani. Terus saya tidak ada kerjaan lain. Ya Cuma dari pertanian saja hasil saya. Hal ini yang membuat hidup saya terasa berat. Mikir ya hanya saya sendiri, tidak ada yang membantu. Kalau biasanya kan sama bapak. Tapi ya mudah-mudahan saya bisa membayar hutang karena hutang saya itu kan ada hubungan dari pemerintah. Kalau saya sampai tidak bisa membayar ya akan kena sanksi.

2. Ketika Anda akhirnya menerima kabar bahwa ia telah diculik oleh polisi, apa reaksi Anda?

   Waktu itu pikiran saya kemungkinan terbesar bapak tetap akan dipenjara. Pikiran saya seperti itu. Lalu apa-apa saya harus kerja sendiri, mikir juga sendiri, tanpa bapak. Tidak ada yang membantu. Pada waktu itu kan saya juga habis menikahkan anak saya. Artinya, setelah itu anak saya juga sudah punya tanggung jawab untuk mengurus keluarganya sendiri.

3. Bagaimana perasaan ibu dalam kurun waktu satu tahun lebih terakhir tanpa Tukijo di rumah? Lalu bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan di ladang?

   Ya, saya mengerjakan dan mengelolanya sendiri. Saya itu pokoknya yang nggak bisa melakukan sendiri itu cuma pekerjaan menyemprot obat ke tanaman. Selain itu ya untuk pekerjaan menyiapkan lahan sebelum tanam biasanya saya membayar orang untuk pekerjaan tersebut. Intinya kalau pekerjaan di ladang yang saya mampu dan bisa kerjakan, ya saya kerjakan sendiri. Ini semua karena keadaan terpaksa.

4. Dilihat dari kondisinya ini kan sangat berat sekali untuk ibu dan sekeluarga, bagaimana kondisi batin ibu?

   Walaupun seberat apapun kondisi ini, insya allah saya bisa menghadapi. Walaupun seberat apapun kondisinya. Ya itu tadi, karena keluarga punya hutang dan itu adalah tanggung jawab. Ditinggal suami juga, apa boleh buat.

5. Bagaimana pendapat Anda tentang proyek pertambangan pasir besi perusahaan? Apakah perasaan Anda berubah sejak Tukijo di penjara?

Saya tetap menolak! Tidak boleh ditambang. Tetap tidak boleh. Walau sampai kapanpun semangat saya tetap tidak boleh ditambang. Karena itu satu-satunya jalan untuk mencari nafkah, mencari makan, untuk segalanya, untuk keluarga saya dan untuk semua petani di pantai pesisir ini.

6. Bagaimana petani lokal mendukung dan membantu Anda dan keluarga Anda sejak perjuangan keluarga Anda dimulai? Apakah para petani masih banyak yang mendukung dan memberikan semangat?

Kalau sampai sekarang ya banyak sekali yang mendukung, banyak yang mendorong kepada saya. Entah itu dari apapun, entah bantuan pikiran, entah itu waktu, entah itu uang, bantuan tenaga, itu banyak yang membantu saya. Itu semua masih mendukung saya, sampai sekarang.

7. Setelah pak Tukijo divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Wates, kabupaten Kulon Progo itu kan ada beberapa upaya hukum yang sudah dilakukan untuk membuktikan bahwa pak Tukijo tidak bersalah. Dari upaya banding sampai kasasi. Namun upaya itu gagal. Putusan pengadilan yang lebih tinggi tetap menguatkan bahwa pak Tukijo bersalah. Bagaimana pandangan ibu terhadap hukum?

Ya saya sangat sakit hati sekali lah, karena bapak itu dipenjara sangat lama. Sedangkan pejabat-pejabat yang korupsi cuma dihukum untuk beberapa bulan. Padahal bapak itu kan hanya petani biasa, kok bisa dipenjara sangat lama. Terus salahnya apa, masalahnya apa? Bapak itu kan sebenarnya niatnya menolong orang lewat (maksudnya

adalah karyawan-karyawan pilot project PT. JMI), supaya yang orang-orang yang lewat itu aman dan selamat, supaya tidak dipukulin masyarakat atau sampai dianiaya. Kok malah akhirnya bapak yang kena bebannya sendiri. Apa keluarganya nggak berat mikirnya karena bapak dipenjara begitu lama. Kalau masalah bapak itu mencuri atau menganiaya orang saya sih nggak apa-apa. Dalam hal ini menurut saya bapak itu tetap tidak bersalah karena membela orang lewat. Tapi mungkin karena ada orang-orang yang tidak suka terhadap apa yang diperjuangkan bapak selama ini, itu kenapa bapak dipenjara begitu lama. Bapak selama ini kan aktiv berjuang menolak tambang pasir besi.

8. Berarti sampai sekarang ini sudah berapa lama pak Tukijo berada di dalam penjara buk?

Sudah satu tahun lebih. Kalau bulan Mei lalu itu genap satu tahun. Berarti sekarang ya kira-kira sudah satu tahun dua bulan.

9. Sepengetahuan ibu, bagaimana perasaan dan pandangan bapak selama di dalam penjara, apakah bapak masih semangat?

Kalau bapak setahu saya itu masih tetap semangat menolak tambang pasir besi. Pokoknya bapak itu walaupun dipenjara tetap memikirkan masyarakat pesisir yang berjuang. Semangatnya seperti apa, dukungannya seperti apa dan bapak masih berharap bahwa warga pesisir tetap gigih untuk berjuang mempertahankan tanah dan melawan penindasan.

10. Apa harapan-harapan anda ke depan?

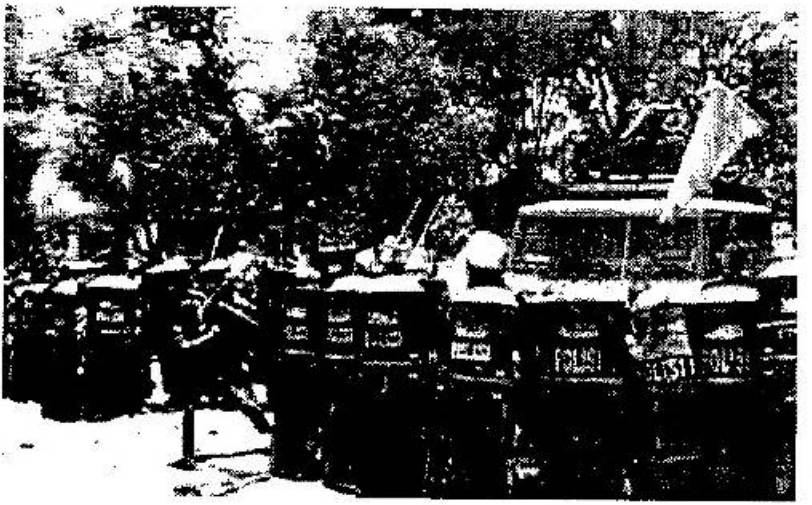
Harapan saya, selalu berdo'a semoga masalah bapak itu cepat selesai. Terus bebas dari penjara. Kembali seperti semula. Kembali bekerja seperti dulu. Sehingga semuanya biar tenteram tidak jadi ditambang.


BEBASKAN
TUKIJO!
KULONPROGO 1 MEI 2011





PETANI TERUS MELANJUTKAN





PERJUANGAN MELAWAN TAMBANG

SG dan PAG, Penumpang Gelap RUUK Yogyakarta

SELAMA ini, wacana perdebatan soal keistimewaan Yogyakarta terlalu terfokus pada penentuan siapa yang berhak menjadi Gubernur dan Wakilnya.

Wacana itu, menurut saya, terlalu sempit. Sebab yang lebih menentukan watak feodal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), adalah keberadaan jutaan hektar tanah-tanah kerajaan di provinsi ini, yang dikenal dengan sebutan *Sultanaat Gronden* (SG) dan *Pakualamanaat Gronden* (PAG).

Bentangan SG dan PAG di DIY itu sangat luas, sebab berdasarkan Rijksblad Kasultanan No. 16/1918 dan Rijksblad Kadipaten No. 18/1918, semua tanah yang tidak dapat dibuktikan merupakan hak eigendom (hak milik) orang lain, otomatis menjadi milik kesultanan dan kadipaten.

Ribuan hektar SG di seluruh DIY, kini terkonsentrasi di Yogyakarta, Bantul dan Sleman) (*Kabare*, Juli 2007, hlm. 14-15). Selain SG, PAG masih luas juga, dan terkonsentrasi di Kulon Progo. Kedua jenis tanah keraton itu merupakan sumber pendapatan kedua keraton itu dari sahamnya di Hotel Ambarukmo, Ambarukmo Plaza, Saphier Square, dan padang golf Merapi.

Pengelolaan tanah-tanah keraton itu berada di bawah yurisdiksi kantor Paniti Kismo, yang dikepalai oleh GBPH Hadiwinoto, adik Sultan HB X, dengan gelar Penghageng Kawedanan Hageng Wahono Sarto Kriyo (*Kabare*, Juli 2006, hlm. 60-62).
Legalisasi SG dan PAG melalui UU Keistimewaan Yogyakarta, sudah berkali-kali ditekankan oleh Sultan Hamengkubuwono X (*Kabare*, Juli 2007, hlm. 13).

Aset Bisnis

Mirip keluarga raja-raja Eropa, persil-persil SG dan PAG menjadi modal bisnis – dan kegiatan sosial – bagi banyak anggota keluarga besar Sultan Hamengku Buwono X dan Paku Alam IX. Di antara adik-adik Sultan yang paling menonjol adalah GBPH Prabukusumo. Ia direktur utama PT Karka Adisatya Mataram, salah satu perusahaan iklan luar ruang terbesar di Yogyakarta, dan Komisaris Utama Jogja TV (*Kabare*, Juli 2005, hlm. 25).

Puteri sulung Sri Sultan, Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Pembayun, paling aktif memanfaatkan tanah keraton warisan Perjanjian Giyanti 1755 itu. Selain memimpin pabrik gula Madukismo, ia mendirekturi pabrik rokok kretek berlabel Kraton Dalem yang punya kebun tembakau sendiri di Ganjuran, Bantul; budidaya ulat sutera PT Yarsilk Gora Mahottama di Desa Karangtengah, Kecamatan Imogiri, Bantul; serta tambak udang PT Indokor Bangun Desa di pantai Kuwaru, Bantul (*Kompas*, 11/8/2003;*Kabare*, Juni 2006, hlm. 24; *Agrina*, 14/4/2008; *Bernas Cyber News*, 1/8/2008; *Jawa Pos*, 30/7/2009).

Namun "permata di mahkota" kerajaan bisnis keluarga keraton Yogyakarta adalah perusahaan tambang pasir besi PT Jogya Magasa Mining (JMM) di Kulonprogo. Di situ Gusti Pembayun dan pamannya, GBPH Joyokusumo, menjadi Komisaris, sedangkan Direktur Utama dijabat oleh BRM Hario Seno dari Puri Pakualaman (sumber: Akte Pendirian PT JMM, 6 Okt. 2005).

Perusahaan milik keluarga keraton Yogya ini kemudian berkongsi dengan Indo Mines Ltd. dari Perth, Australia Barat, menjadi PT Jogja Magasa Iron (JMI), yang berencana menambang pasir besi di pantai Kulon Progo sepanjang 22 Km, mengolahnya menjadi *pig iron* dan mengeksportnya ke Australia. Tak lama setelah Sultan menyatakan siap jadi calon presiden, pemerintah dan PT JMI menandatangani kontrak karya pertambangan pasir besi di Pantai Bugel, Kulonprogo, selama 30 tahun (*Koran Tempo*, 12/11/2008).

Sejak saat itu, perlawanan rakyat pesisir Kulon Progo terhadap rencana pertambangan, yang terorganisir melalui Paguyuban Petani Lahan Pantai (PPLP) Kulon Progo, semakin marak. Tanggal 21 Juni 2009, misalnya, sebanyak 38 truk mengangkut sekitar 5.000 petani pesisir Kulon Progo mendatangi Rektor Universita Gadjah Mada (UGM), Prof. Sudjarwadi, memrotes keberpihakan para peneliti UGM yang merekomendasi reklamasi lahan eks tambang pasir besi itu nantinya.

Alih-alih meneliti revolusi pertanian yang telah dilakukan para petani pesisir Kulon Progo, yang berhasil menyulap lahan pasir hitam menjadi tanah subur untuk menanam cabai, para peneliti UGM sudah menerima rencana tambang itu sebagai keniscayaan. Padahal proyek kongsi Indo-Australia itu bertentangan dengan hukum lingkungan dan tata ruang Kabupaten Kulon Progo.

Selain itu, rencana tambang di Kulon Progo itu juga menunjukkan, besarnya ketergantungan bisnis keluarga keraton Yogyakarta pada tanah-tanah feodal, yang sesungguhnya sudah harus dihapus apabila para bangsawan menghormati UUPA 1960, yang sudah diterima oleh Sultan Hamengku Buwono IX, ayah Sri Sultan sekarang, tanggal 24 September 1984. Bukannya menjalankan *land reform* yang diamanatkan oleh UUPA 1960, keberadaan SG dan PAG yang kontroversial justru dicoba dilegalisasi dengan membonceng pada RUU Keistimewaan Yogyakarta (lihat Pasal 12 Bab VIII).

Itu sebabnya, semua fraksi di DPR-RI yang sedang memperdebatkan RUUK pasal per pasal, hendaknya tidak hanya terfokus pada mekanisme pergantian Kepala Daerah dan wakilnya, tapi lebih memikirkan implikasi legalisasi jutaan hektar tanah-tanah swapraja ini.***

Oleh: *George Junus Aditjondro*
Mulai meneliti soal-soal reforma agraria sejak ikut mendirikan Sekretariat Bina Desa di tahun 1980an

Artikel ini sebelumnya telah dimuat di harian sore Sinar Harapan, *31 Januari 2011.*



KAMI HANYA INGIN BISA BEBAS UNTUK HIDUP

SALAH SATU TANAMAN POKOK DARI KULON PROGO,



CABE MERAH

DEKLARASI FORUM KOMUNIKASI MASYARAKAT AGRARIS

Hari ini, kami para petani dan elemen masyarakat di 10 Kabupaten seluruh Jawa telah menyatukan visi, tujuan, dan gerak untuk mempertahankan Hak Asasi Manusia atas ruang hidup dan merumuskan sikap bersama, yaitu:

1. Siap melawan ketidakadilan yang diwujudkan dalam kebijakan-kebijakan negara-korporasi.
2. Siap mempertahankan hak rakyat atas tanah karena tanah adalah ruang hidup dan sumber penghidupan tak tergantikan.
3. Siap melawan pelaku kejahatan perundang-undangan yang menjadikan hukum sebagai alat dan pembenaran bagi penghancuran tatanan sosial; tatanan ekonomi; tatanan kebudayaan dan lingkungan masyarakat.
4. Menyerukan pada aparat negara untuk menghentikan segala bentuk intimidasi, represi, dan kriminalisasi atas petani dan masyarakat yang mempertahankan haknya sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia, karena aparat negara adalah pelayan rakyat bukan pelayan pemodal.
5. Menyerukan solidaritas, dukungan moral, dan semangat perjuangan kepada saudara-saudara senasib sepenanggungan baik itu di Mesuji Lampung, Takalar, Sumatera Utara, Pesisir Kulon Progo Jogjakarta, Pesisir Kebumen Jawa Tengah, Korban Lumpur LAPINDO Porong Jawa Timur, Kaum Tani di Pandarincang Banten Jawa Barat, Sedulur SIKEP di Pegunungan Kendeng Jawa Tengah, Pesisir Wotgalih Lumajang Jawa Timur, Pesisir Kalipucang dan Cimerak Ciamis Jawa Barat, dan di tempat-tempat lain yang tengah berhadapan dengan kejahatan korporasi.

Yogyakarta 22 Desember

2011Elemen pendukung:

1. JMPPK Pati
2. FOSWOT Lumajang
3. FPPKS Kebumen
4. Serikat Tani Merdeka (SeTAM) Cilacap
5. PPLP Kulon Progo
6. SITAS DESA Blitar
7. LPMB Banten
8. Bale RUHAYAT Tasikmalaya dan Ciamis
9. Forum Warga Cilacap
10. Korban Lumpur LAPINDO Porong Sidoarjo

AKSI SOLIDARITAS DI LONDON, INGGRIS





AKSI SOLIDARITAS DI MELBOURNE, AUSTRALIA

KONTAK SOLIDARITAS DAN INFORMASI :

PPLP website: http://petanimerdeka.tk/

PPLP email: petanimerdeka@yahoo.com

Videos: http://petanimerdeka.tk/blog/

Website solidaritas Australia dalam bahasa Inggris:
http://kpsolidarity.wordpress.com/

Kirimkan surat-surat protes dan solidaritas ke alamat-alamat di bawah ini:

Korporasi Tambang: http://www.indomines.com.au/

Departemen Dalam Negeri (Ministry of Home Affairs)
Alamat kantor : Jl. Merdeka Utara No. 7 Jakarta 10110
Telepon (021) 345-0058, 384-2222 Fax : (021) 383-1193

Departemen Energi dan Sumberdaya Mineral (Ministry of Energy and Mineral Resources)
Alamat Kantor : Jl. Merdeka Selatan 18 Jakarta 10110
Telepon : (021) 380-4242, 381-3233 Fax : (021) 384-7461

Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (HAM) (Ministry of Justice and Human Rights)
Alamat Kantor : Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta 12940
Telepon : (021) 525-3004 Ext. 258, 526-5989 Fax : (021) 526-3082

Anti-Copyright. 2012 Bebas untuk fotokopi



UNREST COLLECTIVE

Adalah sebuah kolektif media publikasi informasi yang tersedia dalam bahasa Inggris dan Indonesia: mengenai beragam kehidupan yang dihancurkan oleh industrialisasi dan peradaban kapitalis...serta beberapa topik lainnya, seperti misalnya metode dan perspektif alternatif untuk bertahan hidup di dunia yang semakin menggila ini.

Until we all are free...

Tetap Semangat

Kontak: unrest-collective@riseup.net
Website: unrestcollective.wordpress.com